

**TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ummul Khairiyah¹, Zarfina¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ummulkhairiyah758@gmail.com

Abstrak

PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang untuk bertindak di bidang pertanahan, maka pejabat tersebut harus memiliki kemampuan khusus di bidang pertanahan agar perbuatannya tidak menimbulkan masalah hukum. Apabila terjadi masalah dalam pembuatan akta jual beli karena kelalaian PPAT, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum di bawah tangan dan dapat dicabut karena syarat subjektif tidak terpenuhi. Jika penyebab masalahnya adalah klien secara tidak jujur meyakini kebenaran persyaratan administratif sebagai dasar untuk membuat kontrak, itu dapat menyebabkan kontrak menjadi tidak valid karena tidak memenuhi persyaratan objektif. Adapun permasalahannya yaitu, 1). Bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuatnya yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta PPAT, 2). Bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi apabila PPAT membuat kesalahan dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dalam prakteknya PPAT memberikan pertanggung jawaban terhadap akta jual beli tanah yang telah dibuatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). PPAT memiliki tanggung jawab atas akta-akta yang telah dibuatnya baik itu pertanggung jawaban secara administratif, perdata maupun pidana. 2) penyelesaian hukum yang dilakukan apabila PPAT melakukan kesalahan dalam pembuatan akta jual beli yaitu penyelesaian hukum yang dilakukan di hadapan pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Akta, Tanah

Abstrak

PPAT as a public official authorized to act in the land sector, then the official must have special abilities in the land sector so that his actions do not cause legal problems. If there is a problem in making the sale and purchase deed due to the negligence of the PPAT, then the deed only has legal force under the hand and can be revoked because the subjective conditions are not met. If the cause of the problem is that the client dishonestly believes the correctness of the administrative requirements as the basis for making the contract, it can cause the contract to be invalid because it does not meet the objective requirements. The problems are, 1). What is the PPAT's responsibility towards the Land Sale and Purchase Deed that is not in accordance with the PPAT deed procedure, 2). How is the settlement of legal problems that occur if the PPAT makes a mistake in the Making of the Deed of Sale and Purchase of Land. The type of research used is a sociological juridical research type where this study aims to find out how in practice PPAT provides accountability for the deed of sale and purchase of land that has been made. The results of this study indicate that 1). PPAT has responsibility for the deeds he has made, whether it is administrative, civil or criminal responsibility. 2) legal settlement that is carried out if the PPAT makes a mistake in making a deed of sale, namely a legal settlement that is carried out before the court.

Keywords: Liability, PPAT, Deed, Land

